



PAPER – **OPEN ACCESS**

Pengorganisasian Komunitas Paska Bencana Studi Kasus: Pengorganisasian Komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK di Aceh Paska Bencana Tsunami Tahun 2004

Author : Ari Ujianto
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.587
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Pengorganisasian Komunitas Paska Bencana

Studi Kasus: Pengorganisasian Komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK di Aceh Paska Bencana Tsunami Tahun 2004

Post-Disaster Community Organizing Case Study: Community Organizing conducted by UPC / UPLINK in Aceh after the 2004 Tsunami Disaster

Ari Ujianto

Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

Email: ariujianto@gmail.com

Abstract

This paper examines community organizing by the Urban Poor Consortium (UPC) / UPLINK in carrying out reconstruction in Aceh after the 2004 earthquake and tsunami disaster. The unprecedented magnitude of the disaster has prompted the Indonesian government to declare it as a national disaster and request for assistance from international agencies. As a response, many organizations at the national and international levels came to assist in the reconstruction of Aceh, with various program focuses and approaches. UPC / UPLINK also took part in the reconstruction stage, but rather with a distinct participatory approach. This paper aims to elaborate the approach UPC/UPLINK has taken in carrying out its post-disaster reconstruction programs in Aceh. This research mostly uses secondary data, namely from documents owned by UPC / UPLINK and data obtained through the internet, as well as primary data with deep interviews with UPC / UPLINK activists. This study found that appropriate approach, strategies, and method of community organizing, taken by UPC/UPLINK are important elements in which the survivors are able stand back on their feet and take ownership of in the post-disaster reconstruction process.

Keywords: community organizing, participation, Aceh, tsunami, post-disaster reconstruction

Abstrak

Makalah ini mengkaji pengorganisasian komunitas (community organizing) yang dilakukan Urban Poor Consortium (UPC)/UPLINK dalam melakukan rekonstruksi di Aceh paska bencana gempa dan Tsunami tahun 2004. Bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada tahun akhir 2004 telah mendorong pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai bencana nasional dan meminta bantuan internasional dalam penanganannya. Setelah itu banyak organisasi di tingkat nasional maupun internasional datang membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, dengan berbagai fokus program dan pendekatan. UPC/UPLINK juga melaksanakan program rekonstruksi dengan pendekatan yang partisipatif dan komprehensif. Makalah ini menawarkan konsep pengorganisaian komunitas yang progresif untuk menganalisis pendekatan dan strategi yang digunakan UPC/UPLINK dalam melakukan program rekonstruksi Aceh paska bencana. Penelitian ini sebagian besar menggunakan data-data sekunder, yakni dari dokumen-dokumen yang dimiliki UPC/UPLINK maupun data yang diperoleh melalui internet, serta data primer dengan wawancara langsung dengan beberapa aktivis UPC/UPLINK yang terlibat dalam program rekonstruksi paska tsunami di Aceh. Penelitian ini menemukan bahwa melalui strategi dan metode pengorganisasian komunitas yang tepat, proses rekonstruksi paska bencana di Aceh yang dilakukan oleh UPC/UPLINK bisa berjalan secara efisien, efektif, dan mencapai hasil yang mempunyai kualitas tinggi. Penelitian juga menyimpulkan bahwa dalam proses rekonstruksi paska bencana, amatlah penting mendudukkan masyarakat lokal (penyintas) sebagai subyek yang memimpin atau tulang punggung dalam proses rekonstruksi.

Kata kunci : pengorganisasian komunitas, partisipasi, Aceh, tsunami, rekonstruksi paska bencana

1. Pendahuluan

Pengorganisasian komunitas (*community organizing*) merupakan sebuah pendekatan dalam intervensi kesejahteraan sosial (*social welfare intervention*) yang berbeda, bahkan secara mendasar, dengan pendekatan lain seperti pelayanan sosial, aktivisme, advokasi, dan pembangunan komunitas [1]. Pendekatan intervensi sosial selain pengorganisasian komunitas selama ini dianggap belum bisa memberikan solusi secara mendasar dan berkelanjutan. Pendekatan pelayanan sosial (*social service*) misalnya, justru dianggap melanggengkan ketergantungan masyarakat terhadap program dari luar komunitas. Sedangkan pendekatan advokasi dianggap hanya berorientasi ke luar (perubahan kebijakan) dan pendekatan pembangunan komunitas hanya berorientasi ke dalam, tanpa orientasi perubahan di pihak yang berada di luar komunitas.

Pendekatan pengorganisaian komunitas menysasar pada solusi mendasar dan berkelanjutan (*sustainable*). Yang dimaksudkan solusi mendasar adalah terjadinya perubahan kebijakan atau relasi kuasa di dalam masyarakat, sekaligus menjadikan pemilik masalah (komunitas misalnya) sebagai tulang punggung dalam penyelesaian masalah tersebut. Hal ini akan membuat kekuatan dalam penyelesaian masalah lebih lestari karena yang bisa mengatasi adalah pemilik masalah sendiri bukan kekuatan dari luar.

Melihat paparan di atas, maka dengan kata lain pengorganisasian komunitas merupakan elemen penting dalam pemberdayaan dan perubahan kebijakan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Kabeer yang menggarisbawahi bahwa yang terpenting dari proses pemberdayaan adalah “power” atau kekuatan membuat pilihan karena sebuah kelompok atau komunitas yang tidak berdaya tidak mampu membuat pilihan [2]. Dengan demikian, jika sebuah kelompok atau komunitas berdaya, maka dalam hubungan kekuasaan mereka tidak dalam sub-ordinasi dari kelompok atau kekuatan lain, melainkan setara.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana model (konsep, proses, prinsip-prinsip) pengorganisaian komunitas yang dilakukan oleh UPC/UPLINK¹ sebagai strategi dalam melakukan rekonstruksi Aceh paska tsunami. Selain itu juga untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengorganisasian komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK tersebut.

2. Konsep Pengorganisasian Komunitas

Beberapa ilmuwan maupun aktivis sosial telah memberikan definisi mengenai pengorganisasian komunitas, yang kadang berbeda secara detailnya. Murphy dan Cunningham dalam Pyles menyebutkan bahwa tugas utama pengorganisasian komunitas adalah untuk memobilisasi orang-orang yang kehilangan haknya untuk melakukan advokasi atas nama mereka sendiri dalam hubungan dengan beberapa struktur kekuasaan untuk mencapai perubahan yang diperlukan [1]. Beberapa orang bahkan menambahkan bahwa membangun komunitas yang saling mendukung adalah elemen vital dari pengorganisasian komunitas dan perubahan pekerjaan.

James Scott (2003) mendefinisikan tujuan dari pengorganisasian komunitas adalah untuk membangun sebuah masyarakat sipil yang cukup kuat untuk mengatasi pasar dan negara. Hal ini dilakukan dengan menciptakan power bagi mereka yang powerless melalui: mengidentifikasi dan melatih pemimpin-pemimpin baru masyarakat, membangun hubungan yang abadi antara individu dan institusi dalam masyarakat sipil, dan dengan melakukan tindakan langsung yang membawa perubahan.

Sedangkan pengertian pengorganisasian komunitas dari Schutz dan Sandy [3] lebih rinci, yakni:

“community organizing seeks to alter the relations of power between the groups who have traditionally controlled our society and the residents of marginalized communities. Organizing groups shift the relations of power by increasing their membership, nurturing and training leaders, gaining a reputation for canny strategy, raising money to fund their infrastructure and staff, and demonstrating their capacity to get large numbers of people out to public actions” (hlm.12) [3].

Jadi, dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, pengorganisasian komunitas mencakup dimensi yang memperkuat komunitas (ke dalam) dan mengubah relasi kekuasaan dan struktur kekuasaan yang selama ini mempengaruhi atau mengontrol komunitas tersebut (ke luar). Penguatan diri ke dalam dan mengubah relasi kekuasaan dengan pihak luar tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan atau langkah-langkah.

Selain meliputi dimensi internal dan eksternal, pengorganisaian komunitas, seperti terurai dari beberapa definisi di atas, menggabungkan 3 elemen dasar, yakni antara posisi, proses, dan tujuan dari pengorganisasian komunitas. Yang dimaksud posisi adalah bahwa komunitas yang melakukan pengorganisasian atau yang diorganisasikan berada dalam posisi yang marjinal, lemah, atau menghadapi masalah (isu) yang berupaya mengubah posisi atau relasi kuasa dengan berbagai tindakan. Sedangkan yang dimaksud proses adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bersama komunitas atau anggota komunitas itu sendiri untuk mengubah posisi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada kesadaran kritis anggota komunitas dan aksi bersama. Sedangkan tujuan dari pengorganisasian komunitas terentang dari hal yang sederhana atau praktis, seperti menyelesaikan masalah-masalah komunitas hingga perubahan struktural (relasi kuasa).

Ada beragam pendapat mengenai proses pengorganisasian komunitas. Christens & Speer misalnya menyebutkan bahwa proses pengorganisaian komunitas mencakup empat (4) elemen utama yang saling terikat dan menjadi sebuah proses yang melingkar, yakni: (1) asesmen/membangun relasi, (2) penelitian secara partisipatif, (3) melakukan tindakan atau mobilisasi, (4) evaluasi dan refleksi [4]. Proses atau langkah-langkah yang dikemukakan Denis Murphy lebih terperinci dari yang diutarakan Speer dan Christen. Menurut Murphy, ada 10 langkah yang merupakan sebuah daur dalam pengorganisasian komunitas, yakni: (1) integrasi, (2) investigasi sosial, (3) program sementara, (4) penggalangan, (5) pertemuan, (6). bermain peran, (7) melakukan tindakan, (8) evaluasi, (9) refleksi, (10) pembentukan organisasi [5].

¹ UPC (Urban Poor Consortium) merupakan sebuah NGO yang didirikan pada 1997 yang concern dan fokusnya pada isu kemiskinan perkotaan. Pada 2002 UPC dan beberapa organisasi rakyat serta NGO lain mendeklarasikan jaringan nasional yang disebut UPLINK (Urban Poor Linkage), dan UPC berperan sebagai sekretariat nasional yang berkedudukan di Jakarta. UPLINK mempunyai beberapa simpul kota yang pada 2004 telah ada 13 (Lampung, Palembang, Medan, Makassar, Kendari, Palu, Pare-Pare, Manado, Pontianak, Yogyakarta, Tasikmalaya, Surabaya, dan Jakarta sebagai sekretariat nasional). Setelah tsunami Aceh, aktivis dari beberapa simpul UPLINK dimobilisasi untuk terlibat dalam program rekonstruksi di Aceh. Beberapa minggu setelah tsunami kemudian ditetapkan ada simpul baru di aceh yang bernama UPLINK Banda Aceh (UBA).

Tattersall mengemukakan hal yang hampir serupa bahwa proses pengorganisasian komunitas merupakan sebuah siklus yang terus menerus yang dimulai dengan pertemuan orang per orang untuk membangun hubungan dan mendengarkan masalah/isu bersama, kemudian bergerak ke penelitian dan perencanaan [6]. Setelah itu bergerak ke tindakan atau melakukan aksi. Proses diakhiri dengan evaluasi. Hasil dari evaluasi kemudian bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses dari awal (pertemuan) dan seterusnya sehingga menjadi siklus yang tak berkesudahan.

Dari pararan beberapa di atas, bisa ditarik garis merah bahwa proses pengorganisasian komunitas titik mulanya adalah dengan integrasi atau membangun hubungan dengan anggota komunitas dengan cara mendengarkan keluhan kesah atau masalah yang dihadapi. Proses selanjutnya adalah melakukan penelitian atau investigasi sosial yang sebisa mungkin dilakukan secara partisipatif. Kemudian proses dilanjutkan dengan membuat perencanaan dengan didasarkan pada hasil penelitian sosial. Setelah itu baru tindakan atau aksi dilakukan. Tindakan ini bisa berorientasi ke dalam (misalnya meningkatkan kohesi sosial anggota komunitas dan meningkatkan kesadaran kritis) atau berorientasi ke luar (misalnya advokasi kebijakan, kampanye). Proses terakhir adalah melakukan evaluasi atau refleksi. Hasil dari evaluasi dijadikan bahan bagi memulai proses awal.

Selain pengertian dan langkah-langkah atau proses, pengorganisasian komunitas mempunyai prinsip-prinsip yang membedakan dengan pendekatan komunitas yang lain. Secara garis besar, ada tiga prinsip pengorganisasian komunitas menurut Apuan [7] yang bisa diuraikan sebagai berikut; (1) Pengorganisasian komunitas melibatkan peningkatan kesadaran kritis melalui pembelajaran langsung dari pengalaman, (2) Pengorganisasian komunitas adalah berbasis massa dan bersifat partisipatoris, (3) Pengorganisasian komunitas berbasis pada kepemimpinan demokratik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis model (konsep, proses, dan prinsip) pengorganisasian komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK dalam program rekonstruksi paska bencana tsunami di Aceh. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam. Dokumen yang dianalisis berupa berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap kerja atau program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska tsunami yang dilakukan oleh UPC/UPLINK, dan arsip-arsip serta laporan yang dipunyai oleh UPC/UPLINK sendiri. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa aktivis UPC yang terlibat sejak awal sampai akhir program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska tsunami, khususnya yang memahami strategi pengorganisasian komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK.

4. Pengorganisasian Komunitas di Aceh Paska Bencana Tsunami

Dua hari setelah tsunami menerjang Aceh, atau tepatnya tanggal 28 Desember 2004, UPC/UPLINK telah menerjunkan tim emergensi beserta bantuan berupa kantong mayat, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan tenda-tenda pengungsian. Untuk keterlibatan UPC/UPLINK di dalam proses emergensi dan selanjutnya rekonstruksi Aceh paska tsunami ini Wardah Hafidz, koordinator UPC/UPLINK, membeberkan alasannya:

“Tsunami Aceh adalah bencana besar, UPC ikut terlibat karena peduli dengan penderitaan dan korban yang demikian besar. Kami juga melihat bahwa ini juga kesempatan belajar bagaimana melakukan pengorganisasian di wilayah yang terkena bencana, makanya yang diterjunkan pertama-tama adalah tim CO (community organizer). Secara garis besar, keterlibatan UPC di Aceh terbagi dalam dua fase, fase emergensi dan fase rekonstruksi”.²

Pada fase emergensi, selain memberikan bantuan logistik, tim dari UPC/UPLINK juga memberikan pelayanan kesehatan alternatif, menghibur anak-anak lewat kelompok bermain anak, dan hiburan lewat kesenian di tenda-tenda pengungsian. Tahapan ini juga digunakan untuk melakukan integrasi dengan penyintas (survivor) di tenda-tenda pengungsian dan mengumpulkan data tentang pengungsi.

Proses integrasi dilakukan dengan mengobrol dan menjadi pendengar yang baik, misalnya disaat melakukan pelayanan kesehatan atau setelahnya. Melalui pelayanan kesehatan dan kelompok belajar anak yang dilakukan oleh tim emergensi UPC/UPLINK, memudahkan tim untuk mengobrol dan diterima oleh penyintas di tenda-tenda pengungsian. Cerita yang banyak muncul dari penyintas adalah tentang peristiwa tsunami ketika terjadi dan bagaimana mereka bisa selamat. Kadangkala mereka juga bercerita tentang kondisi kampung mereka sebelum tsunami, terutama terkait konflik antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tim dari UPC/UPLINK semakin intensif berdiskusi dengan penyintas di tenda-tenda setelah adanya pernyataan dari pemerintah (Bappenas) bahwa korban tsunami tidak boleh kembali ke kampung kecuali kampung atau rumah mereka yang berjarak lebih dari 2,4 kilo meter dari pantai (buffer zone). Mereka juga akan dipindah ke barak-barak sementara, setelah itu direlokasi ke tempat yang jauh dari kampung dan tempat penampungan mereka sekarang.³

² Wawancara dengan Wardah Hafidz, koordinator UPC/UPLINK dan sebagai koordinator tim UPC/UPLINK di Aceh dalam merakukan rekonstruksi paska Tsunami, pada 6 Maret 2019

³.wawancara dengan Wardah Hafidz, 6 maret 2019

Isu atau ancaman dari pemerintah tersebut oleh tim pengorganisasian komunitas UPC/UPLINK (yang kemudian hari mereka biasa menyebut diri sebagai tim sosial)⁴ selain sebagai bahan diskusi yang dikaitkan dengan hak atas tanah, juga untuk menajajaki keinginan warga atau penyintas. Ternyata sebagian besar warga yang di tenda-tenda menolak rencana dari pemerintah, mereka tetap berkeinginan pulang ke kampung mereka.⁵

Tim UPLINK kemudian mendata siapa-siapa yang berkeinginan pulang ke kampung dan setelah itu melakukan survey bersama pengungsi ke kampung-kampung mereka yang telah porak poranda. Selama survey mereka juga mendata bahan-bahan yang masih tersisa dan kemungkinan masih bisa digunakan untuk membangun kembali rumah. Mereka juga melakukan bersih-bersih rumah dan meunasah (masjid) yang masih tersisa. Kemudian satu persatu penyintas yang ada di tenda-tenda pengungsian membongkar tenda mereka dan balik ke kampung dengan difasilitasi oleh UPC/UPLINK, misalnya untuk sewa truk. UPC/UPLINK kemudian juga mengundang pihak pemerintah untuk datang ke kampung dan berdialog langsung dengan warga tentang keinginan mereka. UPC/UPLINK juga bekerjasama dengan ahli untuk membuat konsep alternatif dalam rekonstruksi paska bencana yang diajukan ke pemerintah untuk menolak buffer zone dan memberikan alternatif solusi yang bisa diterima oleh warga dan risikonya sangat kecil jika tsunami terjadi lagi.⁶ Solusi atau konsep alternatif berbasis komunitas tersebut dipresentasikan ke pemerintah (Bappenas) pada awal Maret 2005. Bersamaan dengan itu UPC/UPLINK juga melakukan kampanye ke media massa tentang konsep alternatif tersebut sehingga apa yang terjadi di bawah diberitakan ke media nasional dan stasiun televisi. Ternyata upaya yang dilakukan warga dan UPC/UPLINK berhasil, pemerintah membatalkan buffer zone 2 KM dan menerima alternatif dari warga dan menyepakati untuk mendukung proses perencanaan mikro dari bawah [4].

Setelah itu beberapa penyintas, terutama geuchik (kepala desa) dan tokoh-tokoh dari 14 desa serta warga melakukan ikrar bersama yang dikenal dengan Ikrar Lam Isek pada 7 Maret 2005. Dalam ikrar tersebut disebutkan bahwa mereka menyatukan tekad kembali ke kampung (Woe u Gampong). Mereka akan saling menghargai dan terbuka bekerjasama dengan pihak-pihak yang sejalan dengan misi rekonstruksi, yang bertekad membangun tanah leluhur, menolak relokasi dan menolak *buffer zone* 2 kilo meter dari pinggir pantai. Dan dalam ikrar tersebut mereka juga bersepakat membentuk tim dengan nama Jaringan Udeep Beusaree (JUB).⁷

Pembentukan JUB ini menurut Wardah Hafidz juga dimaksudkan untuk menyatukan suara para warga di 14 desa yang ingin membangun desanya kembali untuk bekerjasama dan melakukan koordinasi dalam melakukan rekonstruksi.⁸ Paska ikrar bersama dan pembentukan JUB, maka dibentuklah tim dari warga sendiri dengan didampingi oleh UPC/UPLINK dalam melakukan rekonstruksi. Tim tersebut meliputi: (1) Tim Tukang, (2) Tim Pendataan, (3) Tim Logistik (Dapur Umum), (4) Tim Penghijauan, (5) Tim Perempuan dan Anak, (6) Tim Ekonomi.

Hal pertama yang dilakukan oleh tim dari kampung bersama UPC/UPLINK adalah membuat tempat tinggal sementara (temporary shelters) bagi warga yang pulang kampung, sebelum ada tempat tinggal permanen yang akan mereka bangun bersama. Tempat tinggal sementara tersebut dibangun dari barang-barang yang dikumpulkan bersama.

Proses selanjutnya adalah perencanaan bersama antara JUB dengan UPC/UPLINK dengan dibantu oleh tim ahli dalam melaksanakan rekonstruksi secara permanen permukiman warga yang tergabung dalam JUB. Dalam perencanaan ini disepakati konsep *Peoples Driven Reconstruction* atau rekonstruksi yang dipimpin oleh rakyat. Hal ini karena rakyat penyintas terlibat penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan rekonstruksi. Tentu saja dengan bekerjasama dengan UPC/UPLINK. Pada waktu itu UPC/UPLINK juga meminta bantuan dari jaringan internasional yakni tim dari Gujarat, India yang bernama Abhiyan dan didukung pendanaan dari Misereor, Jerman dan Development and Peace, Kanada [8].

Rekonstruksi selanjutnya tidak hanya dilakukan di 14 desa, tapi di 23 desa atau gampong, karena jaringan desa JUB juga berkembang menjadi 23 desa di wilayah kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar. Bagi UPC/UPLINK, rekonstruksi tidak sekedar membangun rumah, tapi terintegrasi dengan segala hal terkait dengan kehidupan warga kampung [9]. Sebelum pembangunan rumah dimulai, dilakukan dahulu pemetaan dan pengukuran lahan secara partisipatif, yang kemudian dibantu dengan pemetaan melalui Total Station Survey (TSS) oleh tim teknis UPC/UPLINK. Setelah itu ada proses pengembangan desain rumah, dan pembuatan rumah permanen pertama sebagai percontohan pada 1 Juni 2005. Setelah itu, rekonstruksi dengan pembangunan sekitar 3.300 rumah dan fasilitas kampung seperti meunasah dilakukan.

Proses pembangunan permukiman dipimpin langsung oleh warga sebagai pemilik rumah, yang mengorganisasikan diri dalam Tim Pembangunan Kampung (TPK), kelompok pemilik rumah maupun secara perseorangan. Jika tim ini atau pemilik rumah tidak terlibat dalam pembangunan atau pengawasan, maka pembangunan rumahnya akan lambat dan rumah tidak kunjung selesai sesuai kontrak. Tim ini juga mendapat pelatihan dari UPC/UPLINK untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mereka dalam detail-detail pembangunan rumah serta fasilitas kampung.

Menurut catatan M. Nawir dkk, dalam proses rekonstruksi ada pertemuan-pertemuan rutin dalam beberapa jenjang yang berfungsi sebagai forum koordinasi, perencanaan, pengambilan keputusan terhadap satu hal, serta sebagai media evaluasi [10]. Pertemuan-pertemuan itu meliputi: (1) pertemuan warga yang berhak memperoleh perumahan sesuai data yang masuk di bagian informasi

⁴ Paska masa emergensi, tim UPC/UPLINK dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni tim sosial dan tim teknis, dan selanjutnya ditambah dengan supporting system

⁵ Wawancara M. Nawir, salah satu community organizer UPC/UPLINK yang terlibat dalam rekonstruksi Aceh paska tsunami, 11 Maret 2019.

⁶ Wawancara dengan Wardah Hafidz, 6 Maret 2019.

⁷ <https://news.detik.com/berita/312152/rakyat-aceh-berikrar-bersama-bangun-kampung-halaman>. Diakses pada 8 Maret 2019.

⁸ Wawancara dengan Wardah Hafidz, 6 Maret 2019.

dan dokumentasi (indok). Termasuk di sini adalah pertemuan TPK dengan pemilik rumah yang difasilitasi tim Uplink untuk mengevaluasi peran dan tanggungjawab masing-masing pihak; (2) pertemuan antar kampung dalam Jaringan Udeep Beusaree (JUB). Pertemuan ini dilakukan seminggu sekali pada hari minggu yang diikuti oleh wakil kampung dan geuchik. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua masalah dalam pembangunan dipecahkan dan diputuskan bersama Uplink. Selain itu, pertemuan tersebut juga merupakan wadah silaturahmi warga dari 23 kampung; (3) Pertemuan Tim UPC/UPLINK sendiri; yakni pertemuan Tim Sosial maupun Tim Teknis dengan melakukan koordinasi dan evaluasi kinerja seminggu sekali di posko masing-masing. Ada pula pertemuan Posko Gabungan Tim Sosial dan Tim Teknis pada hari Jumat untuk menjamin bahwa masalah sosial dan teknis dapat dipecahkan dan diputuskan sebagai pegangan bersama.

Mengenai penguatan organisasi JUB, UPC/UPLINK tidak hanya melakukan pelatihan dalam kaitan rekonstruksi fisik tapi juga melakukan pengembangan kapasitas dalam mengelola organisasi, perekonomian, kesehatan alternatif, dan pertanian. Kemudian UPC/UPLINK juga mendorong JUB menjadi organisasi yang mandiri dan mempunyai aturan yang lebih jelas dan transparan melalui musyawarah besar (Mubes) dengan memilih koordinator serta statuta organisasi.

Proses rekonstruksi yang terintegrasi dengan konsep People-Driven Reconstruction yang dilakukan UPC/UPLINK selesai secara “resmi” pada 25 Februari 2007, yakni dengan upacara serah terima seluruh hasil-hasil program rekonstruksi kepada rakyat Aceh di depan ribuan warga desa dalam Jaringan Udeep Beusaree (JUB), puluhan lembaga donor, pejabat pemerintah, serta Gubernur Aceh Irwandy Yusuf.

Program rekonstruksi paska tsunami di Aceh yang dilakukan UPC/UPLINK memperlihatkan hasil yang impresif. Selama hampir 2 tahun (Juni 2005-Januari 2007) UPC/UPLINK telah membangun 3.331 rumah permanen (sekitar 100 rumah untuk eks anggota GAM), jalan dan drainase kampung, meunasah dan masjid mukim, sanitasi dan sarana air bersih, makam, serta menggerakkan kembali denyut perekonomian dan sosial-budaya di 23 kampung. Program rekonstruksi ini memenangkan Dubai Best Practices Award to Improve the Living Environment 2008. Menurut kajian dari UN Habitat pada 2006, program rekonstruksi yang dilakukan UPC/UPLINK termasuk yang tercepat dan memuaskan. Kemudian pada 2007 program ini juga menjadi salah satu dari 4 finalis “the UN Habitat 2007 Scroll of Honor.”

5. Menilai Strategi Pengorganisasian Komunitas UPC/UPLINK

Melihat paparan strategi program emergensi dan rekonstruksi yang dilakukan UPC/UPLINK di Aceh nampak bahwa ada dimensi internal dan eksternal pengorganisasian komunitas yang ditekankan. Penekanan pada dimensi internal nampak pada penguatan kohesi sosial penyintas dengan menyatukan aspirasi melalui pembentukan jaringan penyintas di 14 desa yang ingin kembali ke kampung mereka yang selanjutnya diformalkan dengan pendirian organisasi Jaringan Udeep Beusaree (JUB). Selain meningkatkan kohesi sosial, UPC/UPLINK juga melakukan peningkatan kesadaran kritis melalui upaya diskusi tentang hak tanah (hak penyintas untuk kembali ke kampung halamannya) serta peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan yang dilakukan. Sedangkan dimensi eksternal yang terjadi adalah adanya upaya advokasi kebijakan dengan menolak rencana pemerintah menerapkan *buffer zone* 2,4 kilo meter dari bibir pantai terhadap kampung yang terkena tsunami. Upaya penolakan ini juga diikuti dengan mengajukan konsep atau solusi alternatif, sehingga pemerintah akhirnya merevisi kebijakan terkait *buffer zone* ini.

Strategi pengorganisasian komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK juga merangkum 3 elemen dasar dari pengorganisasian komunitas, yakni adanya posisi, tujuan, dan proses. Posisi di sini mengacu pada komunitas yang diorganisasikan, yakni komunitas yang lemah atau terpinggirkan. Dalam konteks yang dilakukan UPC/UPLINK, komunitas yang diorganisasikan adalah penyintas atau warga yang menjadi korban bencana tsunami yang hampir semua miliknya musnah (rumah, keluarga, kampung, dll).

Elemen yang kedua adalah tujuan, yakni hasil akhir yang diinginkan dari pengorganisasian komunitas. Dalam konteks program UPC/UPLINK di Aceh adalah adanya relasi kuasa yang setara antara penyintas (warga) dengan pemegang kekuasaan lainnya, misalnya pemerintah atau lembaga donor dan organisasi-organisasi kemanusiaan. Relasi kuasa yang setara ini mengandaikan penyintas mempunyai keberdayaan dalam melakukan rekonstruksi secara partisipatif.

Kemudian elemen yang terakhir adalah proses, yakni berbagai tindakan atau langkah yang dilakukan agar tujuan dari pengorganisasian komunitas tercapai. Proses pengorganisasian yang dilakukan UPC/UPLINK dimulai dengan integrasi dengan penyintas di tenda-tenda pengungsian yang diikuti dengan pengumpulan data, peningkatan kesadaran kritis, melakukan perencanaan bersama penyintas untuk kembali kampung, dan kemudian melakukan tindakan dengan kembali ke kampung, menolak kebijakan *buffer zone*, dan akhirnya membuat jaringan kampung yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Jaringan Udeep Beusaree (JUB). Proses ini diulang dalam sebuah siklus lagi setelah kembali ke kampung, tentu tidak dimulai dengan integrasi lagi, tapi dimulai dengan pendataan/penelitian kebutuhan dalam melakukan rekonstruksi. Setelah itu kemudian melakukan perencanaan bersama dengan berbagai pihak yang membantu dalam proses rekonstruksi, dan setelah itu melakukan tindakan rekonstruksi yang dilakukan secara partisipatif. Proses rekonstruksi ini selalu melalui evaluasi rutin dalam berbagai jenjang pertemuan. Pengorganisasian komunitas yang dilakukan UPC/UPLINK juga didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan Apuan (1998), karena UPC/UPLINK menekankan pada kesadaran kritis para penyintas dan kemudian

warga yang tergabung dalam JUB, melalui diskusi, advokasi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Selain itu, prinsip mendasar yang dilakukan adalah bagaimana melakukan proses rekonstruksi paska bencana ini dilakukan secara partisipatif, sehingga konsepnya pun disebut People-Driven Reconstruction. Prinsip pengorganisasian komunitas yang berbasis pada kepemimpinan demokratis juga dilakukan dengan adanya berbagai jenjang pertemuan koordinasi, dan adanya musyawarah besar bagi JUB. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program rekonstruksi dilakukan secara bersama-sama.

6. Kesimpulan

Perbedaan mendasar antara pengorganisasian komunitas dengan pendekatan intervensi sosial lainnya adalah pendekatannya yang komprehensif dan mendasar dengan menekankan dimensi penguatan internal komunitas maupun tuntutan ke eksternal komunitas. Pendekatan ini juga mencakup elemen yang holistik mulai dari menempatkan posisi di pihak yang lemah, menjalani setiap proses, dan adanya tujuan yang mendasar dari intervensi ke komunitas. Pendekatan ini juga dipandu oleh prinsip-prinsip learning by doing untuk peningkatan kesadaran kritis, partisipatoris dan berbasis massa, dan kepemimpinan yang demokratis. Dengan pendekatan seperti ini efisiensi dan efektifitas sebuah program bisa tercapai dengan sekaligus memberdayakan komunitas dan mengubah relasi kuasa di dalam masyarakat, termasuk di masa rekonstruksi paska bencana sebagaimana nampak pada rekonstruksi paska bencana yang dilakukan oleh UPC/UPLINK di Aceh.

Referensi

- [1] Pyles, Loretta. (2009). *Progressive Community Organizing : A Critical Approach for a Globalizing World*. Routledge, London-New York
- [2] Kabeer, Nila. (1999). "The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women.s Empowerment." *UNRISD Discussion Paper* No. 108, August 1999. New York.
- [3] Schutz, Aaron., Sandy, Marie G (2011). *Collective Action for Social Change: An Introduction to Community Organizing*. Palgrave MacMillan, New York.
- [4] Christens, Brian D., Speer, Paul W.(2015). "Community Organizing: Practice, Research, and Policy Implications". *Social Issues and Policy Review*, Vol.9, No.1, 20015, pp.193-222.
- [5] Murphy, Denis. (1990). "Community Organization." *Environment and Urbanization*, Vol.2, No.1, April, 1990, pp. 51-60.
- [6] Tattersall, Amanda (2015). "The Global Spread of Community Organizing; How 'Alinsky-style community organizing traveled to Australia and What We Learnt?" *Community Development Journal*, Vol.50, No.3, July, 2015, pp.380-396.
- [7] Dizon, Josefina Tamayo. (2012). "Theoretical Concepts and Practice of Community Organizing". *The Journal of Public Affairs and Development*, Volume 1, Number 1, January-June 2012, pp 89-123
- [8] Campagnoli, Francesca (2007). JUB/Uplink in post-tsunami Aceh: achievements, potentials, limitations." Network-Association of European Researcher on Urbanization in the South. Diakses melalui http://n-aerus.net/web/sat/workshops/2007/papers/Final_Campagnoli_paper.pdf
- [9] Sukrizal, Ade., Hafidz, W., and Sauter, Gabriela.(2009). "Reconstructing Life after Tsunami: The Work of Uplink Banda Aceh in Indonesia", *Gatekeeper, IIED*, 137i.
- [10] Nawir, M., dkk. (2007). *Rekonstruksi Sosial Gampong Loen Sayang Paska Gempa-Tsunami, 26 Desember 2004; Catatan dari Posko Uplink Indonesia-Banda Aceh*. (Tidak diterbitkan).